**ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM**

**DI MALAYSIA DAN INDONESIA 1990-1998: KAJIAN IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA DAN ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA**

**MAKALAH**

****

**Oleh:**

**Amin Fadlillah**

**NUP:201708175**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**APRIL, 2021**

**ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM**

**DI MALAYSIA DAN INDONESIA 1990-1998: KAJIAN IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA DAN ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIA**

**MAKALAH**

Diajukankepada Lembaga PenjaminanMutu IAIN Jemberuntukdipresentasikandalam seminar diskusi periodic dosen

****

**Oleh:**

**Amin Fadlillah**

**NUP:201708175**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**APRIL, 2021**

**DAFTAR ISI**

**Hal**

**Halaman Judul i**

**Daftar Isi ii**

**BABI PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. TujuanMakalah 4

**BAB II TEORI DAN DINAMIKA ORGANISASI MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI KONSTELASI POLITIK**

A. Pendekatan Teori 6

B. Dinamika Hubungan Gerakan Islam Dan Pemerintah ......................................... 8

C. Memanfaatkan atau Dimanfaatkan? 14

**BABIII KESIMPULAN** ....................................................................................

**Daftar Rujukan** 29

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Peran strategisorganisasi masyarakat (Ormas/NGO)[[1]](#footnote-2) merupakan manifestasi dari idealisme yang coba dilaksanakan dalam setiap masalah mengenai kepentingan publik yang melibatkan antara rakyat dengan pemerintah. Hal ini karena di zaman modern ini, tidak semua masalah kemasyarakatan dapat diselesaikan sendirioleh pemerintah tanpa melibatkan dan bantuan kekuatan di luar pemerintah.Oleh sebab itu, diperlukan sebuah ruang publik yang mandiri (*freepublic sphere)[[2]](#footnote-3)* sebagai jembatan hubungan di antara pemerintah dan masyarakat. Ruang ini menyediakan komunikasi, organisasi sipil, aktivitas politik, gerakan sukarela, dan proses tawar menawar -secara bebas dan mandiri- dengan pemerintah yang dikenal dengan istilah masyarakat sipil.

Eksistensi masyarakat sipil adalah satu ciri penting dalam masyarakat modern yang mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi.Malah, keberadaan masyarakat sipil menjadi prasyarat utama bagi terciptanya masyarakat yang independen dan mandiri di satu negara.[[3]](#footnote-4) Masyarakat sipil yang di dalamnya terdapat NGO sebagai ciri-ciri utamanya dianggap mempunyai otonomi yang independen serta menjadi saluran berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah.Aktor-aktor dalam masyarakat sipil ini senantiasa berkomitmen kepada komunitas politik dan peraturan pemerintah seakan-akan terwujud kesamaan ideologis antara pihak pemerintah dan dengan kelompok-kelompok sosial seperti keluarga, organisasi perdagangan dan organisasi-organisasi kesukarelawanan.[[4]](#footnote-5)

Di Malaysia, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merupakan NGO Islam yang sangat terkenal terutama keterlibatannya dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat Islam melalui jalur pendidikan dan dakwah. Selain itu, ABIM juga dikenal sebagai NGO Islam yang giat bergerak dalam usaha meningkatkan kesadaran Islam melaluiberbagai program dan aktivitaskeislaman seperti berdakwah di masjid, musolla dan gedung perkantoran serta melalui media cetak. Melalui konsep pendidikanterintegrasi seperti Taman Asuhan Kanak-kanak Islam (TASKI), SERI dan SEMI, ABIM semakin meneguhkan identitasnya sebagai NGO Islam yang berbasis falsafah Islam sebagai acuan utamanya.[[5]](#footnote-6)

Selain dalam bidang dakwah dan dunia pendidikan, ABIM juga dikenal sebagai NGO Islam yang berpengaruh dalam percaturan politik negara.Pada era 1970-an, ABIM tercatat sebagai NGO yang kritis terhadap pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu yang menyentuh kepentingan umum seperti praktik korupsi yang berleluasa, gejala nepotisme dan merebaknya masalah sosial yang berlaku di kalangan masyarakat. Skenario politik negara pada masa itu di mana terjadi kekosongan kekuatan penyeimbang (*balancing force*) dalam menghadapi rejim pemerintah, menjadikan ABIM mengambil peran sebagai NGO yang cukup diperhitungkan oleh pihak berkuasa. Melalui pendekatan konfrontasional dan radikal, ABIM bersama NGO-NGO Islam yang lain seperti Darul Arqam dan Jamaah Tabligh telah mengisi ruang kosong pembangkang setelah masuknya partai oposisi Parti Islam se-Malaysia (PAS) dalam koalisi Barisan Nasional bentukan pemerintah pasca peristiwa tragedi 13 Mei 1969.[[6]](#footnote-7)

Di Indonesia, sebagai salah satu NGO Islam yang cukup berpengaruh pada era 1990-an, terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menandai berlakunya transformasi yang cukup penting terhadap dinamika politik rezim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kehadiran ICMI mencatat sejarah tersendiri dalam melihat pola hubungan antara Islam dan pemerintahyang selama ini lebih banyak diwarnai hubungan yang antagonistik dan tidak harmonis. Berdirinya ICMI pada tahun 1990 dilihat sebagai puncak dari serangkaian kebijakan islamisasi[[7]](#footnote-8) yang semakin kentara semenjak rezim Orde Baru mengumdamg-undangkan Pancasila sebagai satu-satunya asas negara.[[8]](#footnote-9) Selain dalam hal undang-undang, peraturan dan dasar kerajaan, pendekatan kerajaan terhadap Islam semakin menonjol dengan munculnya fenomena hijauisasi atau *ijo royo-royo*[[9]](#footnote-10) di kalangan birokrasi dan di kalangan militer.[[10]](#footnote-11) Proses akomodasi yang ekstensifterhadap kepentingan Islam oleh rezim Soeharto ini semakin menguatkan posisi politik Islam dalam proses politik negara terutama dengan apa yang ditunjukkan oleh ICMI.

1. **Topik Bahasan**

Berdasarkan uraian ringkas dalam latar belakang masalah di atas, makalah ini akan mendasarkan kepada beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendekatan teori yang digunakan untuk menjelaskan keberadaan NGO dalam struktur masyarakat sipil?
2. Bagaimanakah proses dinamika yang terjadi antara NGO dan pemerintah dalam menyikapi perkembangan percaturan politik negara?
3. Apakah keterlibatan ICMI dan ABIM dalam skenario politik negara mencederai landasan teoritis ataukah bersifat eklektik yang disesuaikan dengan perkembangan dan lingkungan kekinian?
4. **Tujuan Makalah**

Makalah ini nertujuan untuk menganalisis aktivisme Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) terutama dalam konteks penglibatan mereka dalam skenario politik di negara mereka masing-masing. Makalah ini adalah meneliti persoalan identitas mereka sebagai NGO di satu pihak, namun di pihak lain mengkaji tentang perannya dalam mempengaruhi perkembangan politik pada periode 1990-1998 sesuai dengan frame teori yang digunakan. Periode ini dipilih berdasarkan kepada argumentasi bahwa sepanjang periode ini banyak terjadi peristiwa penting yang melibatkan ABIM dan ICMI dalam dinamika sosio-politik yang terjadi pada periodetersebut. Dengan menitikberatkan kepada persoalan itu,makalah ini ingin menganalisis apakah ABIM dan ICMI menepati sebagai NGO yang pada umumnya bersifat independen, bebas dan kritis atau ia hanya sebagai bagian penopang kekuasaan dan menjadi alat untuk memuluskan kepentingan kelompok status quo.

**BAB II**

**TEORI DAN DINAMIKA ORMAS DALAM MENGHADAPI**

**KONSTELASI POLITIK**

1. **Pendekatan Teori**

Dari aspek teoritis, keberadaan dan aktivisme NGO dapat diidentifikasi dalam kerangka konsep masyarakat sipil (*civil society*).Masyarakat sipil secara umumnya didefinisikan sebagai ruang interaksi antara anggota masyarakat dengan negara yang di dalamnya terdapat organisasi-organisasi sosial (termasuk keluarga), serikat kerja dan termasuk media massa yang sifatnya mandiri dan independen. Golongan ini bekerja di luar lembaga resmi pemerintah yang tujuannya adalah untuk menggalang solidaritas kemanusiaan dan mengejar kebaikan bersama (*public good*).[[11]](#footnote-12)

Oleh karena itu, muncul persepsi yang menyatakan pemerintah adalah penjelmaan dari sikap represif sedangkan masyarakat sipil dipandang sebagai dunia kebebasan.[[12]](#footnote-13)Namun demikian, pemerintah dan masyarakat sipil merupakan satu kesatuan yang saling berhubung. Bagi masyarakat sipil, di satu pihak pemerintah diperlukan karena ia menyediakan kerangka yang sah bagi aktivitas mereka. Di pihak lain,kelompok dalam masyarakat sipil dapat memperjuangkan demokratisasimasyarakat sipil lewat pemerintah. Situasi ini juga yang pada akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai arti demokrasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil yang tidak jarang mencetuskan hubungan yang tegang di antara keduanya.[[13]](#footnote-14)

Keberadaan NGO dalam struktur masyarakat dan negara merupakan satu keniscayaan dan menjadi prasyarat kepada terbentuknya masyarakat sipil yang bermartabat dan demokratis. Hal ini karena NGO berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk berkomunikasi dan memperjuangkan kepentingan umum antara anggota masyarakat dengan pemerintah secara efektif dan seluas-luasnya.Ketika memainkan perannya sebagai fasilitator komunikasi dengan pemerintah, NGO tidak boleh menerima intimidasi, persekusi atau ancaman dari siapapun yang mungkin merasa terancam disebabkan adanya ruang komunikasi itu.

Kebiasaannya, NGO didirikan oleh individu masyarakat secara sukarela dan netral dari kekuatan politik praktis. Dalam upaya untuk merealisasikan visi dan misi organisasi, NGO mengupayakannya dengan dengan cara-cara seperti melobi, mendesak, pendekatan secara persuasif dan adakalanya dengan aksi langsung yaitu berdemonstrasi. Akan tetapi, terdapat juga NGO yang dibentuk untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekansatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.Bahkan,ada yang didirikan sendiri oleh pemerintahuntukmemuluskan kebijakan pemerintah. Namun ada juga NGO yang didirikan denganmaksuduntuk mengkritisikebijakan pemerintah atau malah memposisikan diri sebagai penantang utama ideologi politik yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa.[[14]](#footnote-15)

Ditinjau dari orientasi dan keterlibatan NGO dalam isu-isu yang melibatkan masyarakat dan pemerintahan, terdapat dua kategori NGO iaitu NGO politik (*political NGOs*) dan NGO non-politik (*apolitical NGOs*).[[15]](#footnote-16)Menurut Saliha, NGO politik ialah NGO yang concern dan terlibat secara intensif dalam isu politik dan sosial yang berkembang di masyarakat dan isu politik yang dicetuskan oleh pemerintah baik yang dilakukan secara randomatauselektif. Sedangkan NGO non-politik ialah sebaliknya yaitu menghindari terlibat secara langsung apa yang terjadi dalam dinamika politik.Namun memfokuskan padahal-hal yang berkaitan denganketimpangan ekonomi, tempat pengaduan, wisata, kebudayaan, konsumen dan perdagangan.[[16]](#footnote-17)Dalam arti kata yang lain, ruang lingkup dan keberadaan NGO non- politik ini sebagai pelengkap dan penggerak dalam bidang-bidang yang luput dari perhatian pemerintah seperti kampanye kesehatan dan reproduksi wanita, pencemaran lingkungan dan kesejahteraan sosial.[[17]](#footnote-18)

 Merujuk kepada definisi yang telah diuraikan di atas, ABIM dan ICMI dikategorikan sebagai NGO politik. Keterlibatan dan orientasi mereka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sosio-politik menjadikan mereka sebagai salah satu NGO yang cukup berpengaruh di negara masing-masing. Apa lagi, pimpinan ABIM dan ICMI mempunyai posisi yang kuat di pemerintah. Keadaan ini membawa kepada persoalan yang cukup rumit dalam menilai ABIM dan ICMI sebagai sebuah NGO *an sich*atau sebaliknya. Di satu pihak, sebagai satu NGO, sudah sewajarnya ABIM dan ICMI perlu senantiasa bersifat netral dan mandiri dari elemen manapun yang mempunyai kepentingan terhadapnya sebagaimana yang menjadi ciri-ciri utama masyarakat sipil. Namun di pihak lain, banyak pemimpin di ABIM dan ICMI yang menjadi menteri dan pejabat penting pemerintah. Hal ini telah menimbulkan pertanyaanapakah ia lebih tepat disebut sebagai NGO atau sebagai pendukung pemerintah.Pada kebiasaannya, NGO menonjolkan idealismenya dan berperan sebagai kekuatan penyeimbang (*balancing force*). Bukan sebagaiinstitusi yang menjadi pendukung pemerintahyang menonjolkan pragmatismenya sebagaimana yang ditunjukkan ICMI dan ABIM pada era 1990-an.

1. **Dinamika Hubungan Gerakan Islam Dan Pemerintah**

Semenjak era pasca kolonial, aktivisme Islam *vis-a-vis* pemerintah sering kali menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Di Malaysia, gerakan Islam mengalami beberapa tahapan yang menandai terjadinya pasang surut pendekatan dan cara NGO Islam melihat pemerintah yang berkuasa. Perkembangan ini menunjukkan bahwa suasana dan dinamika sosio-politik yang terjadi sangat mempengaruhi posisi dan pandangan aktivis Islam dalam melihat isu-isu terbaru. Malah, secara umumnya, corak dan pendekatan yang ditunjukkan oleh aktivis Islam ini tidak hanya ditonjolkan oleh kalangan NGO Islam saja, akan tetapi turut dialami juga oleh PAS sebagai partai yang membawa simbolisme Islam. PAS merupakan partai pembangkang dan penantang utama partai UMNO yang berkuasa dalam memperebutkan hegemoni kaum Melayu.

Dalam konteks ABIM sendiri, hubungannya dengan pemerintah juga mengalami dinamikanya tersendiri. Ada beberapa fase penting dalam melihat pendekatan atau hubungan ABIM dengan pemerintah.[[18]](#footnote-19) Pada awal berdirinya terutama pada era kepimpinan Anwar Ibrahim, ABIM membuat pendekatan konfrontasional dan radikal terhadap kebijakan dan tingkah lakupemerintah[[19]](#footnote-20) khususnya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dan korupsi.[[20]](#footnote-21) Melalui saluran dakwah dan penerbitan yang aktif, ABIM bersuara lantang dan kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan umum. Selain itu, ABIM juga mengambil peran sebagai pembela rakyat ketika rakyat menjadi korban kebijakan pemerintah yang salah. Salah satu tindakan ABIM yang cukup fenomenal pada masa itu adalah mengadakan demonstrasi membela petani dan rakyat yang kelaparan di Baling Kedah. Akibat demontrasi ini, Anwar Ibrahim dan beberapa pimpinan ABIM yang lain ditahan dan dipenjara di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri (AKDN).[[21]](#footnote-22)

Pendekatan ABIM yang radikal, memunculkan identitas ABIM sebagai NGO yang disegani. Meskipun ABIM menggunakan pendekatan yang cukup keras, namun pemerintah tidak membalas dengan kebijakan yang keras seperti membubarkan atau menangkap para pemimpinnya.[[22]](#footnote-23) Justeru, untuk meredam efek dan pengaruh ABIM, pemimpin pemerintah mengajakAnwar Ibrahim dan barisan elit ABIM lain bergabung dengan partai penguasa UMNO sejak tahun 1982. Pendekatan pemerintahMalaysia terhadap aktivis gerakan Islam mengkombinasikan pendekatan kooptasi, pemaksaan dan menampung para aktivis dan ide-ide Islam dalam pemerintah sebagaimana yang dialami oleh ABIM.[[23]](#footnote-24)

 Setelah sekian lama berwajah konfrontasional dengan pemerintah, seiringdengan masuknya Anwar Ibrahim ke jajaran partai pemerintah,ABIM mula bertukar haluan dan orientasinya. Perubahan ini sekaligus mengakhiri era pembangkangan ABIM terhadap pemerintah. Kemasukan Anwar Ibrahim ke dalam UMNO itu sendiri dipandang sebagai strategi ABIM untuk bisa mengimplementasikan cita-cita menegakkan syiar Islam lebih tinggi di negara jiran ini. Ketika ABIM berada di luar lingkaran kekuasaan, ABIM hanya dapat mengemukakan ungkapan retorikasaja tanpa dapat merealisasikannya. Dengan berperan sebagai rekan kerja pembangunan negara dan berorientasi kepada tindakan yang konkret, maka ABIM melihat, kepentingan dan kemaslahatan umat Islam akan lebih terjamin dan terbela dibandingkan ketika berada di luar pemerintah.[[24]](#footnote-25)

 Di Indonesia, restu yang diberikan Soeharto terhadap pembentukan ICMI pada penghujung tahun 1990 menjadi indikator penting terhadap dinamika gerakan Islam sepanjang Orde Baru berkuasa.[[25]](#footnote-26)Menarik untuk diamati bahwa pembentukan ICMI ini dengan beragam keilmuan dan latar belakang intelektual anggotanya baik yang dari kalangan modernis (mayoritas) maupun dari kalangan tradisional. Setelah runtuhnya Masyumi pada era Orde Lama, baru pada era ini beragam kalangan ini dapat berkumpul dan bergabung dalam wadah yang sama. Ini sekaligus menjadi pertanda politik Islam mendapat panggung yang cukup besar setelah sekian lama dipinggirkan secara sistematis.[[26]](#footnote-27)Hal ini juga menandai melemahnya legasi ideologisekularismeyang antagonistik apapun yang berbau Islam yang sebelum ini menjadi patron gaya pemerintahan Soeharto ketika awal-awal berkuasa.[[27]](#footnote-28)

Oleh karena itu, dengan berdirinya ICMI maka hubungan dan dinamika antara gerakan Islam dengan pemerintah yang sebelum itu diwarnai dengan ketegangan dan saling mencurigai, maka sejak saat itu hubungan itu menjadi harmonis dan saling bekerjasama.[[28]](#footnote-29) Berbeda dengan ABIM di mana basis pendiriannya berasal dari aktivisme mahasiswa dan direstui oleh golongan intelektual yang independen, berdirinya ICMI diwarnai dengan dimensi politik yang cukup kental. Hal ini disebabkan kebanyakan pemimpin ICMI adalah tokoh politik dan pejabat penting dalam pemerintah.

Salah satu faktor penting mengapa Soeharto merestui berdirinya ICMI adalah adanya upaya perlawanan politik terhadap Soeharto oleh golongan militer yang selama ini menjadi basis pendukung kuatnya. Hal ini memaksa Soeharto memperkuat posisinya dengan mencari dukungan ke aktivis gerakan Islam yang secara tradisinya sering bertentangan dengan skema militer dalam menentukan ideologi negara.[[29]](#footnote-30) Dengan mendapat dukungan dari kalangan Islam, Soeharto dapat mengurangkan pengaruh militerdalammedan pertarungan politik sekaligus mendapat ’kendaraan’ baru untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai presiden periode yang kelima.[[30]](#footnote-31)

 Kemunculan ICMI yang cukup mempengaruhi gelanggang politik Indonesia tidak lepas dari kontroversi. Dari kalangan eksternal Islam, pendiriannya ditentang secara keras oleh militer dan kelompok nasionalis-sekularis. Sedangkan di kalangan internal Islam, meskipun didukung oleh mayoritas golongan intelektual muslim secara khususnya dan di kalangan umat Islam secara umumnya, namun tidak sedikit tokoh intelektual Islam terkemuka yang menolak untuk bergabung ICMI.[[31]](#footnote-32)

Di kalangan militer, penolakan itu tidak disuarakan secara terbuka. Mereka berpandanganberdirinyaICMI sebagai bentuk dari sikap eksklusif dan sektarian di tengah-tengah struktur masyarakat Indonesia yang plural. Oleh sebab itu, kehadiran ICMI akan menyuburkan fanatisme keagamaan dan golongan.[[32]](#footnote-33) Sementara tokoh Islam Deliar Noer berpendapat bahwa ICMI hanya menjadi alat politik pihak berkuasa saja. ICMI tidak betul-betul memperjuangkan aspirasi umat Islam kerana ia hanya akan dijadikan kendaraan politik oleh anggotanya saja. Menurutnya, dengan menjadi anggota ICMI, jalan untuk mencari jabatan politik akan mudah dicapai.[[33]](#footnote-34)

 Arus perubahan orientasi yang terjadi pada ABIM menuai hasil yang cukup kongkrit dengan keluarnya beberapa kebijakan pemerintah yang ’mesra’ Islam seperti Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam, berdirinya Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Bank Islamdan sistem pendidikan integrasiyang berbasis pada falsafah ilmu Islam.[[34]](#footnote-35)Tidak dapat dinafikan, strategi UMNO membawa masuk Anwar Ibrahim ke dalam pemerintah menjadi katalisator kepada gelombang kebijakanislamisasi yang meluas baik di level pemerintahmaupun memberi dampak kepada masyarakat umum.

Peran Anwar Ibrahim sebagai pejabat yang dibantu dengan mesin ABIM-nya dalam usaha mencorakkan negara bersendikan nilai-nilai Islam semakin menonjol sewaktu beliau menjadi menteri keuangan. Pada saat itu, Anwar memperkenalkan sistem keuangan Islam seperti asuransi Takaful, pergadaian Islam dan mewajibkan perusahaan yang berbisniskebutuhan barang Islam harus bersih dari terlibat aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi dan minuman keras. Ketika dilantik menjadi menteri pendidikan, memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR), dan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) di mana unsur pelajaran Islam begitu dominan dan pelajaran tamadun Islam menjadi mata kuliah wajib di level universitas.[[35]](#footnote-36)

 Sedangkan keberadaan ICMI cukup membawa dampak terhadap skenario sosiol politik Indonesia. Secara simbolis, kehadiran ICMI merupakan kemenangan golongan Islam terhadap sistem politik yang ada. Hal ini kerana dari segi sejarahnya, *raison de etre*sistem politik Indonesia diwarnai dengan pertarungan golongan nasionalis *vis-a-vis* Islamis sejak merdeka. Hasil dari kemenangan itu adalah munculnya rentetan kebijakanpemerintah yang pro-Islam.[[36]](#footnote-37) Tidak lama setelah ICMI berdiri, Bank Muamalat juga didirikan pada tahun 1992sebagai bank pertama yang berdasarkan syariah Islam.[[37]](#footnote-38)

Pendekatan Soeharto terhadap kalangan Islam ditunjukkan secara simbolis setelah beliau menunaikan haji bersama seluruh anggota keluarganya pada tahun 1991. Keberangkatan Soeharto untuk menunaikan rukun kelima ini penting karena menjadi petanda semakin meningkatnya pemahaman dan penghayatannya terhadap Islam. Hubungan mesra antara Islam dan rezim ditandai dengan membanjirnya tokoh-tokoh Islam yang dilantik menjadi tokoh penting di dalam pemerintahbaik di dalam kabinet maupun di parlemen setelah ICMI lahir. Yang tak kalah pentingnya adalah fenomena naiknya jenderal-jenderal yang berorientasi Islam di dalam jabatan tertinggi tentara dan tersingkirnya jenderal non-muslim dan jenderal nasionalis. Realitas ini tidak ada sejarahnya dalam skema politik Orde Baru sebelumnya di mana rumusan sistem politiknya adalah tidak ada satupun kelompok, golongan, etnis dan agama tertentu yang diistimewakan dalam urusan negara.

1. **Memanfaatkan Atau Dimanfaatkan?**

Halyang cukup menarik dalam pergulatan ABIM dan ICMI adalahketerlibatan mereka dalam dinamika politik negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua-duanya telah memainkan peran sebagai rekan pembangunan bangsa (*patner in nation-buliding*). Dalam bahasa mudahnya, ABIM dan ICMI menjadi sebagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah khususnya pada era 1990-an. Meskipun secara formal mereka mendeklarasikan diri sebagaiorganisasi yang independen dan tidak terikat dengan kepentingan politik manapun, namun hakikatnya aktivitas dan tingkat keterlibatan mereka jelas menunjukkan ABIM dan ICMI sebagai pendukung pemerintah.

 Jika di ABIM ada sosok Anwar Ibrahim sebagai tokoh pentingnya, maka di ICMI ada B.J. Habibie sebagai ikonnya. Karir mereka dalam dunia politik cepat bersinar dan terus menjadi tokoh penting dalam pemerintah pada awal mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan. Keduanya berhasil menaiki tahta kedua tertinggi sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk Anwar Ibrahim dan menjadi Wakil Presiden untuk Habibie. Keduanya juga dianggap sebagai putra mahkota kepada pemimpin tertinggi di kedua negara yang suatu saat nanti digadang-gadangakan menggantikan bosnya. Sebagai mantan aktivis Islam, legasi Anwar Ibrahim dalam memperjuangkan syiar Islam tidak diragukan lagi kemampuannya untuk mewujudkan cita-cita memerintah negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Manakala dalam sosok B.J. Habibie, meskipun tidak mempunyai latar belakang sebagai intelektual Islam, namun prestasi beliau dalam bidang teknologi tinggi dan sebagai orang asing pertama yang dilantik menjadi direkturindustri pesawat terbang di Messerschmitt-Bolkow-Blohm,[[38]](#footnote-39) menjadikan beliau sebagai idola kalangan aktivis Islam pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

 Walau bagaimanapun, kemesraan dan hubungan kedua NGO ini sebagai rekan pembangunan negara berakhir dengan dramatisdengan tercetusnya gerakan reformasi pada 1998 di Indonesia dan Malaysia. Segera setelah Anwar Ibrahim dipecat dari semua jabatannya dan kemudian dipenjara, ABIM memutuskan untuk ’bercerai’ dengan pemerintah. ABIM juga yang pertama kali menyuarakan isu reformasi serta menjadi penggerak utama gerakan reformasi.[[39]](#footnote-40)Bersama dengan beberapa NGO lain baik yang NGO sekular dan NGO non-Islam, ABIM menggalangaliansi kekuatan NGO di Malaysia dalam menentang tindakan pemerintah menzalimi Anwar Ibrahim.

Dengan menggunakan isu menegakkan keadilan, menentang kezaliman dan mengutuk praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela di lingkaran kekuasaan, ABIM memimpin pembentukan aliansi antara NGO dan kekuatan politik di seluruh Malaysia. Aliansi itu bernamaGAGASAN dan GERAK yang anggotanya terdiri dari NGO dan partai politik pembangkang.[[40]](#footnote-41) Aliansi ini juga yang mengadakan demonstrasi yang berterusan di Kuala Lumpur dan sekitarnya yang dikatakan terbesar semenjak Malaysia merdeka.[[41]](#footnote-42) Meskipun gerakan reformasi ini mengalami kegagalan dalam menjatuhkan pemerintah sebagaimana di Indonesia, namun dalam konteks yang lebih luas, gerakan reformasi ini berhasil membuka mata dan pikiran masyarakat terhadap penyelewengan pemerintah yang kemudian menciptakan satu kondisi dan kesadaran baru politik rakyat Malaysia.[[42]](#footnote-43)

Di Indonesia, jatuhnya Soeharto akibat gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998, mengantarkan B.J Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga. Secara tidak langsung, naiknya Habibie menjadi presiden membuat ICMI sangat berpengaruh dalam jagat politik Indonesia. Apa lagi, ketika Soeharto masih berkuasa, struktur pemerintahanbanyak diisi dengan orang-orang ICMI yang duduk di dalam kabinet maupun di parlemen.[[43]](#footnote-44) Tidak lama setelah Habibie berkuasa, ICMI memainkan peran yang cukup penting dalam mengantarkan Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum Golkar, partai terbesar di Indonesia yang telah memerintah sepanjang Orde Baru berkuasa. Kemenangan Akbar Tanjung atas lawannya yang berasal dari fraksi militer itu, memberi jaminan akan selamatnya kedudukan Habibie sebagai Presiden sehingga pilihan raya dilaksanakan pada tahun berikutnya.[[44]](#footnote-45)

Latar belakang dinamika ABIM dan ICMI yang demikian, sudah tentu memberikan gambaran bahwa aktivisme NGO Islam tersebut lebih menonjolkan nuansa politiknya dibandingkan sebagai sebuah NGO yang sepatutnya bebas dari unsur-unsur politik partisan. Sebagai bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat sipil, secara teoritisnya, kedudukan sebuah NGO adalah independen dan mandiri dari kepentingan apapun dan campur tangan institusi politik. Lazimnya, NGO selalu menjaga jarak terhadap kekuasaan dan berpandangan kritis ketika menghadapi dengan isu-isu yang menjadi basis perjuangannya. Idealisme semacam ini tentu bermaksud supaya NGO mampu menjadi kekuatan penyeimbang, berperan sebagai kelompok penekan(*pressure group*) dan pengawas tingkah laku pemerintah (*watchdog*) yang efektif. Sepanjang NGO mampu konsisten dalam kerangka yang sedemikian, maka tidak muncul pertanyaan siapa memanfaatkan siapa dan kubu mana yang diuntungkan dengan keadaan yang begini.

Apa yang menonjol dalam kedinamikan ABIM dan ICMI pada era 1990-an adalahpandangan partisannya ketika pemimpin tertingginya berada di pusat kekuasaan. Ketidaknetralan ini semakin terlihat ketika mantan pemimpin ABIM dan ICMI tidak lagi menjadi pemimpin negara, posisi dan cara pandang NGO tersebut kembali ke ’habitat’nya masing-masing. Jika sebelumnya, menjadi rekan pembangunanbangsa yang strategis dan cukup berpengaruh dalam menentukan percaturan sosial politik negara, akan tetapi setelah itu bersikap kritis dan melakukan oposisi kepada pemerintah. Setelah pemimpinnya tidak lagi menjadi pemimpin pemerintah, maka ABIM dan ICMI pun mengatur ulang hubungannya dengan pemerintah.

ABIM kembali fokus kepada dunia dakwah dan pendidikan serta mengkonsolidasikan internal mereka setelah sebelumnya tenaga dan perhatian merekatersedot pada gerakan reformasi. Satu hal lagi ’berkah’ yang dirasakan ABIM pascagerakan reformasi, ABIM dilihatberperanan sebagai pemersatu dan perpaduan ummah setelah sepanjang dua dekade sebelumnya tenggelam oleh arus pragmatisme yang melanda ABIM. Dalam situasi yang begini, ABIM kembali kepada pendirian dan watak aslinya yaitu independen dan mandiri dari institusipolitik sekaligus mengambil peran sebagai jurubicara ummah yang selama ini menjadi slogan organisasi.

Sedangkan dalam konteks ICMI, pasca gagalnya Habibie dalam pemilihan Presiden pada 1999, ICMI seolah-olah kehilangan orientasinya dalam melanjutkan kiprahnya sebagai organisasi intelektual yang disegani. Posisi dan peran ICMI untuk turut serta dalam arus pembangunan negara seperti mana ketika didirikantidak terdengar lagi. Para tokoh masyarakat tidak lagi tertarik masuk ke ICMI sebagaimana dulu mereka berebut masuk. ICMI telah menjadi bagian dari sejarah politik Indonesia yang sempat menghegemoni pemerintahan dan setelah itu tenggelam. Ini membuktikan bahwa berdirinya ICMI bermotifkan politik semata-mata sebagaimana yang banyak diduga banyak orang (terutama dari musuh politiknya) adalah tidak bisa dibantah. ICMI tidak mampu menyaingi NGO Islam lain seperti NU dan Muhammadiyah karena ICMI tidak mempunyai akar rumput yang massif. Dan yang terpenting dari itu ialah berdirinya organisasi bukan semata-mata didasarkan kepentingan sesaat, tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang dan harus independen dari kepentingan politik apapun.

**BAB III**

**KESIMPULAN**

Persekitaran sosio-politik yang melingkupinya merupakan narasi yang tepat bagi menggambarkan watak dan kedinamisan sebuah NGO dalam memperjuangkan idealismenya. Ada kalanya diperlukan satu pendekatan yang bertentangan dan ada masanya juga diperlukan pendekatan yang sederhana dan berkompromi. Sekalipun kerap terjebak dalam situasi yang pragmatis dalam percobaan untuk menterjemahkan misi dan cita-cita besarnya, namun begitu secara umumnya pendekatan ABIM dan ICMI tetap dilakukan dalam kerangka masyarakat sipil yang menjadi tonggak kepada terciptanya masyarakat yang berwibawa.

**BIBLIOGRAFI**

**BUKU**

Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Cohen, J. and Andew Arato, *Civil society and Political Theory*. Massachusets: MIT Press, 1992.

Crouch, Harold, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: CornellUniversity Press, 1978.

Edward and Hulme, *Making a Difference. NGOs and Development in a Changing World*. London: Earthscan Publications, 1992.

Geerzt, Clifford, *Religion of Java*, Chicago dan London: University of Chicago Press, 1976.

Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*. (terj). Bandung: Mizan, 1995.

Habbermans, Jurgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1989.

Hefner, Robert W., Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia (terj), Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001.

Hefner, Robert W., Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama di Indonesia, dalam Mark R. Woodward (pnyt), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (terj. Ihsan Ali Fauzi), Bandung: Mizan, 1996.

Kamarulnizam Abdullah, *The Politics of Islam in Contemporary Malaysia*, Bangi: Penerbit UKM, hal: 91.

Khoo Boo Teik, Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohammad, Kuala Lumpur: OxfordUniversity Press, 1995.

Lipset, Seymour Martin, *The Encyclopedia of Democracy*, London: Routledge, cet. I, 1995.

M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Makmur Makka dan Dhuroruddin Mashad, *ICMI Dinamika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO, 1997.

Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mietzner, Marcus, From Soeharto to Habibie: the Indonesian Armed Forces and Political Islam during the Transition, dalam Geoff Forrester (edt), *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos*? Singapore and Leiden: KITLV and Institute of Southeast Asian Studies, 1999.

Nasrullah Ali Fauzi (pnyt), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995.

Ramage, Douglas E., *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi* (terj), Jogjakarta: Penerbit Mata Bangsa, 2002.

Saliha Hassan, Political Non-Governmental Organizations: Ideal and Realities dlm Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik (pnyt). *Demoracy in Malaysia: Discourse and Practices*. London: Curzon, 2002.

Saliha Hj Hassan,NGO, Masyarakat Sivil dan Demokrasi, Dlm Abdul Rahman Embong (pyt). *Negara, Pasaran dan Pemodenan Malaysia*, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000.

Woodward, Mark R., *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, Tucson: University of Arizona Press, 1989.

Yoshiki Kaneko, Malaysia, Dual Structure in the State-NGO Relationship, Dlm Shinichi Shigetomi (pnyt), *The State and NGOs: Perspective from Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002.

Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*, Jakarta: INIS, 1998.

**JURNAL**

Abdurrahman Wahid, Intelektual di Tengah Eksklusivisme, *Prisma*, No. 3, Tahun XX Maret 1991.

Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Islamist Realignment and the Rebranding of the Muslim Youth Movement of Malaysia, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 30, No. 2 (2008), hal: 216-224.

Camroux, David, State Responses to Islamic Resurgence in Malaysia: Accomodation, Co-optation and Confrontation, *Asian Survey*, Vol. XXXVI, No. 9, September 1996.

Diamond, Lary, Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal Democracy* 5 (3), 1994.

Hefner, Robert W., Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class, *Indonesia*, Number 56, October 1993.

Liddle, William, The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation, *Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996).

Samson, Allan A., Army and Islam in Indonesia, *Pasific Affair*, Vol. XLIV, No. 4, Winter, 1971-1972.

Syafii Anwar, Islam, Negara dan Formasi Sosial dalam Orde Baru: Menguak Dimensi Sosio-Historis Kelahiran dan Perkembangan ICMI, *Ulumul Qur’an*, No. 3, Vol. III, 1993.

**TESIS**

Amin Fadlillah, Aliran Kesedaran Negara (ALIRAN) dalam Gerakan Reformasi di Malaysia 1998-1999, Projek Sarjana, Sains Politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, 2005.

Syed Ahmad Hussein, Islam and Politics in Malaysia 1969-1982: The Dynamics of Competing Traditions, Disertasi PhD, YaleUniversity, 1988.

Weiss, Meredith L. 2001. The politics of protest: Civil society, coalition building and political change in Malaysia. DisertasiPhd.YaleUniversity.

**KERTAS KERJA**

Mohammad Redzuan Othman, Sejarah Penyebaran, Perkembangan dan Penghayatan Islam dalam Masyarakat Melayu, Kertas Kerja Seminar Sejarah Nasional Malaysia, anjuran Universiti Malaya dan Kerajaan Negeri Melaka, 27 November 2008.

**WAWANCARA**

Wawancara dengan Nasir Tamara, pensyarah tamu Institute of Southeast Asian Studies dan mantan pengurus pusat ICMI, Kuala Lumpur, 12 Februari 2010.

Wawancara dengan Shaharuddin Badarudin, mantan Setiausaha Agung ABIM, Kuala Lumpur 31 Mei 2010.

**MEDIA DAN WEBSITE**

<http://www.abim.org.my>

Beringin Makin Hijau, *Tempo*, 3 Oktober 1992.

Makmor Tumin, NGO dalam Sistem Demokrasi Malaysia, *Massa*, 16 Mei 1998.

Rustam A. Sani, A New Atmosphere and Consciousness in Malaysia, *Aliran Monthly*, September 19 (8), 1999.

1. Di Indonesia, selain istilah organisasi masyarakat (ormas), dikenal juga istilah lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (Ornop). Di Malaysia, selain istilah pertubuhan bukan kerajaan, istilah lain yang juga banyak digunakan adalah badan bukan kerajaan (BBK). Meskipun dari segi bahasa penggunaan istilah NGO kurang tepat karena diambil dari bahasa Inggeris, namun dari segi penerimaan dan pemakaian yang begitu meluas di kalangan akademik, media dan orang awam, maka istilah NGO lebih sesuai digunakan berbanding istilah lain. Untuk selanjutnya akan digunakan istilah NGO dalam makalah ini. Di Malaysia. pemakaian istilah seperti pertubuhan bukan kerajaan atau badan bukan kerajaan pada kebiasannya merujuk kepada organisasi yang aktivitasnya fokus kepada aktivitaskesejahteraan masyarakat, persatuan olahraga, kaum ibu-ibu atau yang tidak memantulkan dimensi politik. Disebabkan objek kajian ini adalah NGO politik, maka pemakaian istilah NGO lebih tepat digunakan. Untuk keterangan lanjut tentang peranan dan fungsi NGO di Malaysia, lihat Makmor Tumin, NGO dalam Sistem Demokrasi Malaysia, *Massa*, 16 Mei 1998, hal: 62-63. Dalam konteks NGO di Indonesia, lihat Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996. [↑](#footnote-ref-2)
2. Istilah ini dipopularkan oleh seorang sosiolog terkenal asal Jerman Jurgen Habbermans dalam tulisannya, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1989. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan. (terj). Bandung: Mizan, 1995. [↑](#footnote-ref-4)
4. Seymour Martin Lipset, *The Encyclopedia of Democracy*, London: Routledge, cet. I, 1995, hal: 240-242. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mohammad Redzuan Othman, Sejarah Penyebaran, Perkembangan dan Penghayatan Islam dalam Masyarakat Melayu, Kertas Kerja Seminar Sejarah Nasional Malaysia, anjuran Universiti Malaya dan Kerajaan Negeri Melaka, 27 November 2008, catatan kaki 147. [↑](#footnote-ref-6)
6. Syed Ahmad Hussein, Islam and Politics in Malaysia 1969-1982: The Dynamics of Competing Traditions, Disertasi PhD, YaleUniversity, 1988. [↑](#footnote-ref-7)
7. Selain dalam bentuk pendirian ICMI, ada beberapa pendekatan dan kebijakan pemerintah yang dilihat membela kepentingan umat Islam seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai Zakat dan diluluskannya peraturan pemakaian jilbab oleh siswa sekolah menengah oleh Kementerian Pendidikan dan pendirian bank syariah pertama Bank Muamalat Indonesia. Pada waktu yang sama, Soeharto secara peribadi mendirikan beberapa yayasan seperti Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Salah satu tujuan utama yayasan ini adalah membangun masjid-masjid diseluruh pelosok Indonesia.Selain itu yayasan ini turut membiayai pengiriman pendakwah-pendakwah Islam yang dikirim ke daerah pedalaman dan terpencil di mana wujud ancaman misionaris Kristen yang berusaha menyebarkan agamanya. Untuk keterangan lanjut mengenai proses diterimanya program-program keislaman oleh rezim Orde Baru, lihat Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, hal; 278-300. [↑](#footnote-ref-8)
8. Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam dan Ideologi Toleransi* (terj), Jogjakarta: Penerbit Mata Bangsa, 2002, hal: 150. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ijo royo-royo diambil dari bahasa Jawa yang artinya warna hijau yang dominan. Warna hijau identik warna Islam. Definisi ini merujuk kepada dominannya pejabat yang berlatar belakang aktivis Islam yang duduk di pemerintahan. Laporan media tentang fenomena ini lihat, Beringin Makin Hijau, *Tempo*, 3 Oktober 1992. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pada era Orde Baru, militer merupakan golongan yang cukup besar kekuatannya dalam menentukan arah politik pemerintah selain kekuatan Presiden.Sebagai bagian dari pendiri Golkar yang merupakan parti pemerintah yang sangat hegemonik dalam segala hal, perubahan pimpinan militer darikalangan non-Islam atau kalangan nasionalis ke pimpinan yang kuat komitmennya kepada Islam, semakin menguatkan posisi Islam dalam percaturan politik negara. Kajian tentang begitu berpengaruhnya golongan tentera terhadap sistem politik di Indonesia lihat, Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1978. [↑](#footnote-ref-11)
11. Cohen, J. and Andew Arato, *Civil society and Political Theory*. Massachusets: MIT Press, 1992, hal: ix. [↑](#footnote-ref-12)
12. Lary Diamond, Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation. *Journal Democracy* 5 (3), 1994, hal: 151-159. [↑](#footnote-ref-13)
13. Akibat berlakunya perbedaan kepentingan, hubungan NGO politik dan pemerintah senantiasa pasang naik dan bahkan saling syak wasangka antara keduanya. Hubungan yang panas akan timbul sekiranya terjadi benturan ideologis dan kepentingan praktis. Kajian tentang dinamika hubungan NGO dan pemerintah, silakan lihat, Edward dan Hulme, *Making a Difference. NGOs and Development in a Changing World*.London: Earthscan Publications, 1992, hal 16. [↑](#footnote-ref-14)
14. Saliha Hj Hassan,NGO, Masyarakat Sivil dan Demokrasi, Dlm Abdul Rahman Embong (pyt). *Negara, Pasaran dan Pemodenan Malaysia*, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 2000, hal: 225. [↑](#footnote-ref-15)
15. Diskusi lanjut tentang kategorisasi NGO politik dan non-politik ini, lihat Saliha Hassan, Political Non-Governmental Organizations: Ideal and Realities dlm Francis Loh Kok Wah dan Khoo Boo Teik (pnyt). *Demoracy in Malaysia: Discourse and Practices*. London: Curzon, 2002. Bandingkan dengan Yoshiki Kaneko, Malaysia, Dual Structure in the State-NGO Relationship, Dlm Shinichi Shigetomi (pnyt), *The State and NGOs: Perspective from Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002. [↑](#footnote-ref-16)
16. Saliha Hassan, *Political Non-Governmental Organizations,* Hal: 226. [↑](#footnote-ref-17)
17. Yoshiki Kaneko, *Malaysia,Dual Structure in the State-NGO Relationship*, hal: 183. [↑](#footnote-ref-18)
18. Menurut Ahmad Fauzi, ada lima fase periode waktu yang penting yang menunjukkan dinamika hubungan antara ABIM dan pemerintah. Fasa pertama, yaitu tahun 1971-1981 yang disebut sebagai fasa idealisme dan pembentukan watak organisasi. Fase kedua, 1981-1991 disebut fasa matang, yaitu satu proses di mana ABIM mula merubah pola hubungannya dengan pemerintah. Fase ketiga, 1991-1998 yang disebut sebagai fase pragmatis.Fase ini menunjukkan ABIM sebagai rekan pembangunan yang strategis bagi pemerintah.Fase keempat, 1998-2003 yaitu fasa reformasi.Kasus pemecatan Anwar Ibrahim membawa ABIM kembali sebagai NGO yang menjaga jarak dengan kerajaan meskipun tidak seradikal pada fase pertama.Fasa terakhir 2003 dan seterusnya di mana ABIM menunjukkan posisi yang moderat dan kembali fokus ke wilayah pendidikan dan dakwah. Lihat Ahmad Fauzi Abdul Hamid, Islamist Realignment and the Rebranding of the Muslim Youth Movement of Malaysia, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 30, No. 2 (2008), hal: 216-224. [↑](#footnote-ref-19)
19. Lihat profil ABIM, http://www.abim.org.my/profil-abim.html [↑](#footnote-ref-20)
20. Kamarulnizam Abdullah, *The Politics of Islam in Contemporary Malaysia*, Bangi: Penerbit UKM, hal: 91. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Hussein, *Islam and Politics in Malaysia*, hal: 296. [↑](#footnote-ref-22)
22. Huraian tentang reaksi kerajaan terhadap aktiviti NGO Islam dan fenomena dakwah lihat, Mohammad Abu Bakar, *Penghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiran tentang Islam Semasa*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987. [↑](#footnote-ref-23)
23. David Camroux, State Responses to Islamic Resurgence in Malaysia: Accomodation, Co-optation and Confrontation, *Asian Survey*, Vol. XXXVI, No. 9, September 1996. [↑](#footnote-ref-24)
24. Wawancara dengan Shaharuddin Badarudin, mantan Sekretaris Umum ABIM, Kuala Lumpur 31 Mei 2010. [↑](#footnote-ref-25)
25. Analisis tentang kelahiran ICMI dan bangkitnya kelas menengah masyarakat sivil yang ditunjukkan golongan santri, lihat Robert W. Hefner, Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class, *Indonesia*, Number 56, October 1993. [↑](#footnote-ref-26)
26. M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. Lihat juga kajian Pramono U.Tanthowi, *Kebangkitan Politik Kaum Santri: Islam dan Demokratisasi di Indonesia 1990-2000*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2005. [↑](#footnote-ref-27)
27. Keterangan lanjut tentang pengaruh kuat aliran falsafah Jawa dalam birokrasi elit Orde Baru, lihat Allan A. Samson, Army and Islam in Indonesia, *Pasific Affair*, Vol. XLIV, No. 4, Winter, 1971-1972. [↑](#footnote-ref-28)
28. Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, op.cit, hal: 25-27. [↑](#footnote-ref-29)
29. Analisis yang cukup menarik atas perubahan orientasi politik Soeharto terutama dalam contoh ICMI, lihat William Liddle, The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation, *Journal of Asian Studies* 55, no. 3 (1996). [↑](#footnote-ref-30)
30. Meskipun mengakui faktor penentangan militer cukup mempengaruhi perubahan strategi politik Soeharto, namun bagi Nasir Tamara yang juga dikenal sebagai aktivis Islam, faktor itu bukanlah faktor yang dominan. Sebagai seorang muslim, perubahan orientasi politik ini menunjukkan timbulnya kesadaran Islam yang terjadi pada diri Soeharto. Apa lagi, setelah itu beliau menunaikan haji dengan seluruh anggota keluarganya. Dengan usia yang semakin tua, kalangan aktivis Islam percaya bahwa motivasi utama Soeharto merangkul kalangan Islam dan banyak mengakomodasi tuntutan golongan Islam bukan semata-mata bertujuan untuk mengekalkan kekuasaannya yang sudah digenggamnya selama lima periode, akan tetapi karena didasari timbulnya penghayatan yang cukup mendalam terhadap Islam. Oleh sebab itu beliau menolak pandangan para pengkaji Barat yang menyatakan faktor mempertahankan status quo adalah satu-satunya alasan Soeharto melakukan Islamisasi rezimnya. Wawancara dengan Nasir Tamara, dosen tamu Institute of Southeast Asian Studies dan mantan pengurus pusat ICMI, Kuala Lumpur, 12 Februari 2010. [↑](#footnote-ref-31)
31. Di antara tokoh dan intelektual Islam yang menolak bergabung, untuk sekadar menyebut nama, iaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Deliar Noer, Juwono Sudarsono dan Ridwan Saidi. [↑](#footnote-ref-32)
32. Abdurrahman Wahid, Intelektual di Tengah Eksklusivisme, *Prisma*, No. 3, Tahun XX Maret 1991. [↑](#footnote-ref-33)
33. Nasrullah Ali Fauzi (pnyt), *ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi*, Bandung: Mizan, 1995. [↑](#footnote-ref-34)
34. Khoo Boo Teik, *Paradoxes of Mahathirism: An Intellectual Biography of Mahathir Mohammad*, Kuala Lumpur: OxfordUniversity Press, 1995. [↑](#footnote-ref-35)
35. Kamarulnizam Abdullah, *The Politics of Islam, hal: 183.*  [↑](#footnote-ref-36)
36. Lihat catatan kaki no. 9. [↑](#footnote-ref-37)
37. Analisis terhadap peranan ICMI dalam proses penubuhan Bank Muamalat, lihat Robert W. Hefner, Islamisasi Kapitalisme: Tentang Pembentukan Bank Islam Pertama di Indonesia, dalam Mark R. Woodward (pnyt), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia* (terj. Ihsan Ali Fauzi), Bandung: Mizan, 1996. [↑](#footnote-ref-38)
38. Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia (terj), Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001, hal: 231. [↑](#footnote-ref-39)
39. Wawancara dengan Shaharuddin Badaruddin Kuala Lumpur, 31 Mei 2010. [↑](#footnote-ref-40)
40. Untuk kajian mengenai keterlibatan NGO dalam reformasi lihat, Amin Fadlillah, Aliran Kesedaran Negara (ALIRAN) dalam Gerakan Reformasi di Malaysia 1998-1999, Projek Sarjana, Sains Politik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, 2005. [↑](#footnote-ref-41)
41. Meredith L. Weiss, The Politics of Protest: Civil Society, CoalitionBuilding and Political Change in Malaysia. DisertasiPhd.YaleUniversity, 2001, hal: 1. [↑](#footnote-ref-42)
42. Rustam A. Sani, A New Atmosphere and Consciousness in Malaysia, *Aliran Monthly*, September 19(8): 1999, hal: 21-25. [↑](#footnote-ref-43)
43. Bagaimanapun, tidak semua pengurus ICMI menjadi bagian dari kelompok rezim yang berkuasa.Ada beberapa tokoh yang tidak mau masuk dalam jabatan penting di pemerintahan dan tetap berpandangan kritisl terhadap pemerintah serta konsisten memperjuangkan isu-isu yang pada era Orde Baru merupakan isu yang sensitif seperti demokratisasi dan hak asasi manusia.Antara tokoh-tokoh itu adalah Nurcholis Madjid, Amien Rais, Dawam Rahardjo dan Syafii Maarif. [↑](#footnote-ref-44)
44. Pasca kejatuhan Soeharto, Golkar sebagai partai penguasa mengadakan Kongres luar biasa untuk memilih ketua umum yang baru. Jika pilihan Habibie yaitu Akbar Tanjungkalah dalam pemilihan ketua umum Golkar, maka besar kemungkinan Habibie akan diturunkan menjadi presiden dan diganti oleh golongan pendukung Soeharto. Keterangan lanjut lihat, Marcus Mietzner, From Soeharto to Habibie: the Indonesian Armed Forces and Political Islam during the Transition, dalam Geoff Forrester (edt), *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos*? Singapore and Leiden: KITLV and Institute of Southeast Asian Studies, 1999, hal: 93-96. [↑](#footnote-ref-45)